

Bencana Bagi Nelayan

Oleh Erwan Efendi

Sejak negara ini merdeka, pemerintah tidak pernah serius menangani berbagai masalah nelayan. Kalau pun ada perhatian, hanya untuk kepentingan politik

Bicara soal kemiskinan identik dengan nelayan dan jika bicara soal nelayan sama artinya membicarakan kawasan pesisir. Kemiskinan yang menyelimuti kehidupan nelayan sepanjang tahun bukan hanya masalah materi tapi juga miskin ilmu pengetahuan. Komunitas nelayan tumbuh dan berkembang apa adanya, di kawasan kumuh tak layak huni. Pemukiman mereka hampir tidak pernah disentuh pembangunan. Eksistensi nelayan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti terlupakan bahkan mungkin dilupakan. Padahal, kontribusi mereka cukup besar mencerdaskan bangsa melalui ikan hasil tangkapannya.

Latar belakang kehidupan pahit itulah, nelayan menyambut baik keinginan pemerintah untuk mengubah sejumlah peraturan terkait perikanan dan kelautan. "Saya mau ubah peraturan menteri dulu, banyak-banyak. Tadi bapak (presiden) bilang boleh. Semua boleh diubah demi lebih baik," kata Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti, usai diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kompleks Istana Presiden Jakarta (*Waspada*, 1/11).

Berbagai persoalan sepanjang tahun selalu saja dihadapi nelayan dan menyebabkan kehidupan mereka semakin terjepit. Seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai kebutuhan penting (*primer*) dalam mendukung operasional melaut. Nelayan bingung, mereka tidak tahu mau berbuat apa menghadapi persoalan tersebut. Sebab kenaikan harga BBM tidak disertai bertambahnya ikan hasil tangkapan dan naiknya harga penjualan. Hasil tangkapan lebih sering tidak dapat menutupi keperluan operasional apalagi memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Satu-satunya solusi mengatasi persoalan itu, nelayan terpaksa berhubungan kepada para *tengkulak*. Mereka meminjam uang untuk keperluan operasional juga menutupi kebutuhan keluarga. Pinjaman tersebut akan dibayar setelah kembali dari laut dengan harapan akan mendapat hasil tangkapan. Namun bagaimana kalau nasib lagi *apes*. Nelayan terpaksa harus terus membangun hubungan kepada *tengkulak*. Apalagi pada musim *panceklik*, sehingga pinjaman terus membengkak. Pada titik tertentu, jika pinjaman belum juga

dapat dilunasi, *tengkulak* menyita harta yang dimiliki. Sampan *botot* dan jaring usang yang selama ini satu-satunya tumpuan usaha memenuhi kebutuhan keluarga berpindah menjadi milik *tengkulak*. Bahkan mungkin isi rumah. Kalau pun ada tanah peninggalan orang tua sudah tidak lagi menghasilkan atau telah dijual.

Para nelayan terpaksa berubah haluan mencari pekerjaan lain demi menutupi keperluan keluarga. Hijrah ke kota merupakan satu-satunya alternatif yang sering dilakukan. Di kota mereka bekerja sebagai buruh kasar seperti tukang becak, kerja bangunan dan buruh di pabrik. Mereka tidak mampu bekerja pada bagian yang lebih baik dari itu karena tidak memiliki ketrampilan (*skill*).

Kalau di darat, tanah warisan leluhur sudah berpindah kepemilikannya kepada pengusaha kuat yang hijrah dari kota ke desa. Petani berdasar itu mengubah lahan yang mereka milik secara turun temurun dari tanaman pangan menjadi tanaman keras seperti kelapa sawit dan karet. Sementara lahan di laut sudah dikuasai pengusaha kakap yang memiliki pukat gerandong dan sejenisnya telah menguasai wilayah teritorial penangkapan ikan nelayan. Laut tidak lagi aman sebagai tempat mengadu nasib. Setiap saat rawan terjadi bentrokan antara nelayan tradisional dengan anak buah kapal gerandong. Sudah banyak korban terutama materi akibat bentrokan tersebut seperti yang sering terjadi di perairan kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Tak Mampu

Eksistensi nelayan skala kecil sepanjang tahun terus terdesak oleh kapitalis bukan hanya di darat tapi juga di laut. Padahal setelah tanah warisan, laut merupakan satu-satunya tumpuan kehidupan. Sementara negara terkesan tidak mampu melindungi keberadaan nelayan tradisional dari desakan kekuatan para kapitalis yang bergerak di sektor kelautan. Padahal, sudah ada regulasi yang mengatur tentang wilayah penangkapan masing-masing alat tangkap. Bahkan pukat gerandong dan sejenisnya telah dilarang beroperasi di perairan Indonesia. Tetapi, pengusaha gerandong menafikan ketentuan itu dan para nakhodanya secara berkolaborasi mengobok-obok kawasan penangkapan nelayan kecil sekira tiga mil laut dari bibir pantai.

Oknum aparat terkesan berada di balik operasional alat tangkap padat modal ini. Indikasinya, tidak pernah ada penangkapan pukat gerandong dan sejenisnya meskipun pelanggaran itu terjadi di depan mata mereka. Berbagai kesepakatan sudah dilakukan antara nelayan kecil dengan pengusaha pukat gerandong. Bahkan kesepakatan itu dimotori pemerintah daerah, seperti di kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Namun kesepakatan itu tetap saja tidak dipatuhi sementara pemda tidak mampu menindak tegas pelaku pelanggaran.

Sejak negara ini merdeka, pemerintah seperti tidak pernah serius menangani berbagai masalah nelayan. Walaupun mereka sudah menyampaikan aspirasinya baik melalui surat, diskusi bahkan demonstrasi. Kalau pun ada perhatian, hanya untuk kepentingan politik seperti pengucuran kredit Keppres No. 39 Tahun 1980. Ketika itu setiap nelayan diberi kredit dan langsung dalam bentuk satu unit alat tangkap kapal motor. Tetapi apa yang terjadinya. Banyak nelayan yang harus berurusan bukan hanya kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) tapi pihak berwajib karena tidak mampu membayar cicilan. Mereka dihukum seperti menghormati bendera di panas matahari, membersihkan parit dan lain sebagainya.

Meskipun sudah menjalani hukuman, bukan berarti hutang berkurang apalagi lunas. Wajar saja kalau nelayan tidak mampu mengembalikan kredit mengingat pengetahuan mereka tentang mesin sama sekali tidak ada. Mereka tidak mampu memperbaiki ketika terjadi kerusakan di tengah laut. Akhirnya, dengan alat tangkap kredit itu nelayan lebih lama di rumah daripada di laut. Pemberian kredit itu awalnya diharapkan mampu menambah nikmat tetapi yang terjadi adalah sebaliknya yakni sengsara. Semua itu adalah merupakan potret sebagian kecil kehidupan nelayan. Masih banyak persoalan lain yang terus menyelimuti kehidupan mereka seperti pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.

Para nelayan berharap, pemerintahan Jokowi/Yusuf Kalla dengan Kabinet Kerjanya, mampu mengangkat harkat dan martabat mereka dari keterpurukan selama ini. Selama ini berbagai kebijakan dan regulasi yang lahir cenderung untuk kepentingan kapitalis. Sementara yang menyentuh langsung kepentingan nelayan tidak pernah ada. Keberadaan nelayan dirasa penting hanya ketika pada masa perhelatan politik seperti pemilihan presiden, kepala daerah dan anggota legislatif. Eksistensi nelayan dalam bingkai NKRI hanya sebagai obyek daripada pembangunan, bukan sebagai subjek. Nelayan saat ini menjadi penonton di negerinya

12/11-2014

sendiri daripada menjadi pemain. Mereka menjadi buruh tani atau buruh nelayan kepada para kapitalis yang memegang kekutan ekonomi dari kota hingga desa.

Penutup

Justru rencana pemerintah menaikkan harga BBM tentu mendapat sambutan positif nelayan sepanjang kebijakan itu mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung. Tetapi, sebaliknya kenaikan harga BBM bisa menjadi bencana bagi nelayan. Pengalaman selama ini, bantuan langsung tunai (BLT) yang dikucurkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM sedikitpun tidak mengatasi persoalan mereka, malah menambah beban. Karena kenaikan harga BBM diikuti kenaikan harga bahan pokok. Keinginan nelayan sangat sederhana, yakni bagaimana kebutuhan pangan, sandang dan papan terjangkau. Kemudian negara melindungi mereka dari berbagai gangguan keamanan ketika mencari nafkah di laut. Semoga.

*Penulis adalah Humas Harian Waspada
Medan.*